

# Kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru terintegrasi pada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran

Syarifah Balkis<sup>1</sup>, Risma Niswaty<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

**Abstract.** This study aims to determine the implementation of the Integrated Teacher Professional Education Program (PPGT) policy at the Study Program of Office Administration, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Makassar, and find out the determinant factors for the implementation of the PPGT Policy at the Study Program of Office Administration. This study uses Edward III Policy implementation model. There are four concepts studied, namely: 1) communication; 2) resources; 3) disposition/attitude; and 4) bureaucratic structure. The findings of this study showed that there was inconsistency in communicating program objectives; constraints in resources are the authority possessed by the implementor in implementing policies is still limited; the attitude of the implementor is sufficient to support the implementation of the program; and the bureaucratic structure in the area of origin of the program participants has changed and has an impact on changes in local policy.

**Keywords:** Integrated Teacher Professional Education, implementation model, PPGT policy

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan di dalam dunia pendidikan di daerah 3T telah lama kita sadari. Masalah-masalah tersebut diantaranya meliputi pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, efektifitas dan efisiensi pendidikan, secara spesifik Permasalahan pendidikan di daerah 3T antara lain yang terkait dengan tenaga pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi dibawah standar (*underqualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*). Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T adalah angka putus sekolah yang masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang.

Namun, dengan dalih keterbatasan pembiayaan, akses transportasi sulit dijangkau, serta berbagai peraturan berlaku selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan masalah tersebut. Sebagai ilustrasi betapa sulitnya menempatkan tenaga guru di daerah-daerah kepulauan. Berbagai persoalan pelayanan pendidikan di daerah kepulauan seperti membangun sarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi atau langkanya alat-alat bantu proses belajar mengajar, anak-anak belum terlayani pendidikannya, angka putus sekolah yang masih tinggi, juga masalah kekurangan guru, begitu pula tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional menghambat daerah kepulauan untuk mengejar ketertinggalan.

Beberapa hasil kajian teoritis dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat kompleks permasalahan pendidikan yang dihadapi di daerah 3T dan daerah terbelakang di Indonesia yaitu: Arismunandar mengemukakan bahwa terdapat lima penyebab terjadinya ketimpangan pemerataan dan kualitas pendidikan di daerah pinggiran, yaitu geografi, sosial, ekonomi, belum memadainya layanan pendidikan khusus, dan belum memadainya program pemberdayaan masyarakat di daerah pinggiran. Untuk mengatasi hal tersebut, dikemukakan dua strategi untuk melakukan percepatan pendidikan, yaitu: a) perluasan cakupan pendidikan layanan khusus (PLK) dalam rangka pemerataan pendidikan yang meliputi pengembangan sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat, dan sekolah terintegrasi; dan b) peningkatan kualitas pendidikan khususnya di sekolah menengah dan perguruan tinggi melalui perluasan program afirmasi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pengembangan pendidikan berasrama (boarding) pada jenjang SLTP, SLTA, dan jenjang perguruan tinggi, dan pengembangan pendidikan vokasi kepada para pemuda sesuai dengan potensi alam dan lingkungan di daerah pinggiran.

Idrus mengemukakan bahwa pemerataan pendidikan disebabkan oleh; a) Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, b) Perbedaan fasilitas pendidikan, c) Sebaran sekolah tidak merata, d) Nilai masuk sebuah sekolah dengan standart tinggi, e) Rayonisasi. Sehingga, mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek dan mengabaikan aspek yang lain sehingga dapat menimbulkan masalah. Setijopradjudo et

al. mengemukakan bahwa tantangan yang sangat besar dihadapi pemerintah dalam pemerataan pendidikan untuk daerah kepulauan disebabkan oleh; a) kondisi geografis kepulauan yang terpisah-pisah, b) penyebaran penduduk yang tidak merata, c) ketersediaan infrastruktur pendidikan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, dikemukakan tiga strategi untuk melakukan pemerataan pendidikan di daerah kepulauan, yaitu: 1) pengembangan sekolah di darat, 2) pengembangan sekolah terapung, dan 3) pengembangan perahu sekolah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Program Studi Pend. Adm. Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Program Studi Pend. Adm. Perkantoran merupakan pelaksana Program PPGT dari tahun 2011-2018. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah sejumlah data yang dijaring dari para informan yang dianggap representative diperoleh secara sengaja (*purposive*), yakni untuk memperoleh informasi berkenaan dengan fokus penelitian melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumen yang diperoleh dari Alumni Program PPGT sebanyak 5 orang. Terdapat empat deskripsi focus yang diteliti yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis data menggunakan model interaktif, yang dimulai dari pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rintisan Program Pendidikan Guru Profesional Terintegrasi (Berkewenangan Ganda) yang dimaksud adalah pendidikan guru profesional yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang bersamaan baik program akademik substansi bidang studi maupun akademik kependidikan dan dilanjutkan dengan PPL yang intensif di sekolah mitra serta diakhiri uji kompetensi dengan memiliki kewenangan ganda (*multy grade/multy subject*).

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman peneliti sebagai partisipan observer, penyelenggara program telah cukup memahami tujuan program PPGT. Namun demikian, beberapa kendala teknis pelaksanaan masih ditemukan, seperti keterbatasan dalam penyusunan kurikulum dan teknis penyelenggaraan berasrama karena program ini adalah program rintisan, sehingga penyelenggara program masih menerapkan kegiatan yang berdasarkan persepsi dan kajian personal ataupun secara kelembagaan melalui prodi.

Sasaran kebijakan program PPGT telah tercantum dengan jelas dalam buku panduan, namun demikian, dalam operasional pelaksanaannya masih ditemukan

keterbatasan. Sebagai satu-satunya penyelenggara program di bidang Administrasi Perkantoran, penyelenggara lebih banyak berkoordinasi dengan pengelola atau penyelenggara di LPTK lainnya di luar Sulawesi.

Sosialisasi program PPGT dilakukan secara terbatas. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan saat rekrutmen dan dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) yang akan menyeleksi dan mengirimkan peserta-pesertanya. Prodi tidak melakukan sosialisasi, melainkan hanya memfasilitasi pelaksanaan workshop-workshop bagi peserta dan dosen.

Prodi dan pihak P3G sangat terbuka kepada peserta PPGT untuk mengkomunikasikan berbagai hal, mulai dari hal yang bersifat pribadi maupun hal-hal yang bersifat kelompok atau kelembagaan. Struktur pengelola juga memudahkan prodi untuk berkomunikasi dengan peserta karena ada penanggung jawab asrama yang bertugas memantau kehidupan berasrama setiap peserta. Terdapat mekanisme komunikasi yang baik antara peserta program dengan pengelola, baik di tingkatan prodi maupun di tingkat universitas melalui P3G. Pihak pengelola cukup akomodatif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola PPGT ini.

Program ini menghasilkan calon guru dengan kewenangan utama sebagai guru pada salah satu mata pelajaran produktif dan kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif dikhususkan pada mata pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dan mata pelajaran Kewirausahaan.

Model Kurikulum Rintisan Program PPGT Guru SMK dan berasrama ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) semester dengan beban belajar pendidikan akademik sekurang-kurangnya 144 SKS dengan sebaran untuk kewenangan utama 120 SKS (meliputi beban belajar untuk kompetensi akademik kependidikan, kompetensi akademik bidang studi utama, dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial, serta pra kondisi PPG melalui magang/internship) dan kewenangan tambahan 20-30 SKS (kompetensi akademik bidang studi tambahan), serta beban belajar untuk Program PPG 36-40 SKS.

Untuk mencapai tujuan program ini, maka disusun perangkat-perangkat sumber daya pengelola di setiap LPTK. Komposisi pengelola PPGT bertingkat, mulai dari prodi hingga Rektor Universitas Negeri Makassar, dengan pembagian tugas dan wewenang yang berbeda. Pengelolaan anggaran masih terpusat ditangani oleh P3G dan dilanjutkan beralih ke fakultas, sehingga prodi tidak memiliki peran apapun. Pihak pimpinan fakultas juga tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggarannya. Kendala lainnya adalah keterlambatan pencairan dana, terutama di awal tahun anggaran. Biaya penyelenggaraan program ini bersumber dari dana APBN



Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti tahun 2012. Sarana prasarana untuk program PPGT tidak disiapkan secara khusus, melainkan memanfaatkan sareana yang digunakan oleh mahasiswa regular. Beberapa fasilitas belum memenuhi standar yang diharapkan sesuai buku panduan pelaksanaan program PPGT ini.

Proses penyelenggaraan Rintisan Program PPGT harus berlangsung secara objektif, transparan, partisipatif, kolaboratif, efektif, efisien, dan akuntabel. Prinsip ini harusnya ditegakkan oleh pimpinan. Namun demikian, dari hasil observasi di prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran masih terjadi praktik-praktik yang tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel yang dilakukan oleh oknum pimpinan fakultas. Struktur birokrasi pengelola PPGT Perkantoran di UNM menerapkan birokrasi yang kolaboratif.

#### **4. KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) pada Program Studi Pend. Adm. Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dikaji pada empat aspek yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi telah berjalan dengan baik dengan pola mekanisme pelaporan setiap tahapannya dan telah ada panduan pelaksanaan program. Pada aspek sumberdaya, keterbatasan pada sarana prasarana ditemukan pada fasilitas keasramaan. Untuk aspek disposisi, pengelola telah melaksanakan komitmen kerja yang baik melalui setiap tahapan program. Aspek struktur birokrasi masih terkendala dengan adanya praktik masih tidak transparannya pimpinan, terutama dalam pengelolaan anggaran. Faktor determinan terhadap Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) pada Program Studi Pend. Adm. Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar adalah sumber daya dan disposisi.